

Saya Tanggung Jawab!

Dari Halaman 1

itu semuanya, Indonesia bukan negara sembarangan, kita hitung enggak masalah itu," kata Prabowo di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Selasa (4/11).

"Jadi PT KAI tidak usah khawatir, semua tidak khawatir, rakyat, kita layani rakyat kita. Kita berjuang untuk rakyat, teknologi semua sarana itu tanggung jawab bersama, dan di ujungnya tanggung jawab Presiden RI. Jadi saya sekarang tanggung jawab Whoosh," ucap Prabowo menambahkan.

Prabowo mengaku telah mempelajari persoalan tersebut dan pede permasalahan itu akan teratasi.Ia pun meminta seluruh pihak untuk

Janji Bangun Kereta Cepat di Luar Jawa

Dari Halaman 1

Prabowo di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (4/11).

"Daripada pakai truk-truk yang banyak, jalan rusak, habisin BBM. Kereta api listrik kita akan sangat turunkan biaya ekonomi," sambungnya.

Presiden Prabowo meminta Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono untuk segera merencanakan kereta cepat tersebut. Ia meminta perencanaannya digarap ber-

Walikota Diduga Langgar UU NO. 28 Tahun 1999

Dari Halaman 1

Sebab, Chairin Simanjuntak adalah sepupu istrinya, dan masih kerabat dekat Wali Kota Binjai. Selain itu, LSM ini juga menyoroti sejumlah jabatan strategis diduga kuat dikuasai oleh keluarga Wali Kota Binjai, Drs. Amir Hamzah, M.AP.

Publik menilai, di bawah kepemimpinan Amir Hamzah, birokrasi di Pemko Binjai telah menyimpang jauh dari prinsip merit system yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, serta PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN. Demikian pernyataan aliansi LSM Kota Binjai kepada wartawan, Selasa (4/11/2025)

Menurut LSM P3H Sumut, M Jaspen Pardede, didampingi Ketua LSM LPPASRI, Zulkifli Gayo bahwa keluarga Wali Kota kuasai jabatan strategis di Pemko Binjai.

Data yang dihimpun mengungkapkan, sejumlah pejabat di Pemko Binjai memiliki hubungan kekerabatan langsung dengan Wali Kota Binjai, di antaranya: Heni, Kepala Inspektorat – keponakan Wali Kota; Andi, Kabag Ekonomi – keponakan Wali Kota; Musa, Camat Binjai Utara – saudara Wali Kota; Chairin Fitri Simanjuntak, Kepala Bappeda merangkap Pj Sekda – sepupu istri Wali Kota.

"Fenomena ini memperkuat dugaan bahwa proses mutasi dan promosi jabatan di Pemko Binjai tidak lagi berdasarkan kompetensi, melainkan kedekatan darah dan loyalitas politik," tegasnya.

Padahal, Pasal 9 ayat (2) PP No. 11 Tahun 2017 menegaskan, pengangkatan ASN dalam jabatan harus mempertimbangkan integritas, kompetensi, dan kinerja — bukan hubungan keluarga.

Chairin Fitri Simanjuntak Diduga Bawa ASN “Impor” dari Deli Serdang

Dugaan pelanggaran makin dalam ketika muncul fakta bahwa Chairin Fitri Simanjuntak — yang

50 Orang di Indonesia Meninggal Setiap Hari

Dari Halaman 1

Diskusi Terbuka Tentang Bahaya Narkoba di Jakarta, Selasa (4/11) dikutip Antara.

Zainul menambahkan cairan vape kini juga teridentifikasi mengandung narkotika jenis etomidate, senyawa anestesi yang di Taiwan dikategorikan sebagai narkotika golongan I.

Di sisi lain, sebanyak 52,97 persen penghuni lembaga pemasyarakatan tercatat merupakan nara-pidana kasus narkotika.

Zainul menjelaskan terdapat ciri-ciri umum orang yang terpapar narkoba dengan istilah '7 ong plus', yakni bohong, nyolong, nodong, songong, ompong, bengong, dan rempong.

Untuk memperkuat upaya pencegahan, BNN meluncurkan program IKAN (Integrasi Kurikulum Anti Narkoba) agar pendidikan antinarkoba masuk ke dalam sistem pembelajaran sejak dini.

KPK Sita Uang Rupiah, Dolar AS dan Poundsterling

Dari Halaman 1

KPK masih menunggu satu orang lain yang terjaring OTT di Riau untuk sampai Jakarta.

Lembaga antirasuah belum membuka identitas para pihak yang tertangkap tangan tersebut.

Kota yang Pandai Membongkar, Tapi Lupa

Dari Halaman 1

Warga sudah berbulan-bulan hidup di antara tumpukan lumpur dan sampah yang dibiarkan terbuka. Anak-anak melintas dengan hati-hati agar tak terperosok. Para pedagang menatap warungnya yang sepi karena pembeli enggan singgah. Kota ini seakan kehilangan rasa tanggung jawab pada hal yang paling sederhana, yakni menyelesaikan pekerjaan yang sudah dimulai.

“Parit dibongkar, tapi tak diperbaiki. Kami seperti ditinggal di tengah jalan,” keluh seorang warga. Kalimat sederhana itu sebetulnya sudah cukup menjadi tamparan. Sebab, di balik lubang-lubang itu, menganga juga mental kerja asal-asalan yang kini tampaknya m enjadi gaya baru birokrasi kota. Lebih cepat merusak daripada memperbaiki.

tidak mempolitisasi polemik tersebut.

"Jangan kita menari di gendang orang, mungkin ada pihak-pihak dari enggak tahu dari mana yang ingin selalu menimbulkan kece-masan rakyat, enggak, tenang-tenang saja," ucap dia.

Prabowo pun menyebut seluruh transportasi publik seperti Whoosh jangan dihitung apakah merugi atau untung.

Namun, ia meminta seluruh pihak melihat apakah proyek itu bermanfaat atau tidak bagi publik.

"Semua public transport di seluruh dunia jangan dihitung untung-untung, rugi, hitung manfaat enggak untuk rakyat, di seluruh dunia begitu, ini namanya public service obligations,"

sama Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.

"Saya minta, kapan mulai, segera mung-kin. Sulawesi, Kalimantan, Sumatra," pinta Prabowo.

"Ini mereka tuh satu tahun kerja, dia bilang sama dengan tiga tahun. Enggak ada Sabtu-Minggu, kan?" sambungnya.

Prabowo mengatakan penyediaan transpor-tasi publik adalah tanggung jawab pemerintah. Oleh karena itu, ia berpendapat pembangunan transportasi tak melulu soal untung-rugi.

"Whoosh itu semua public transport, di selu-ruh dunia, jangan dihitung untung-rugi, hitung

juga mantan Kadis Perhubungan Binjai — disebut membawa ASN dari Deli Serdang untuk menempati jabatan strategis di Pemko Binjai.

Beberapa nama yang dikonfirmasi antara lain: - Romi Surya Dharma, Camat Binjai Barat — sebelumnya Camat Batang Kuis, Deli Serdang.

- Rahmat Azahar Siregar, Sekretaris Dinas Per-hubungan — sebelumnya Camat Hamparan Perak, Deli Serdang.

- Roma Putra, Kabid PAUD dan Pembinaan Masyarakat Dinas Pendidikan — sebelumnya Kabid Pembangunan Kawasan Ekonomi Pedesaan, Dinas PMD Deli Serdang.

Selain mereka, sumber internal menyebutkan, sedikitya ada tujuh ASN lain yang dibawa dari Deli Serdang dan kini sudah dilantik di Pemko Binjai.

Padahal, mekanisme mutasi lintas daerah diatur tegas dalam Pasal 73 PP Nomor 11 Tahun 2017, yang mensyaratkan adanya persetujuan tertulis dari kepala daerah asal dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Jika prosedur ini dilanggar, maka mutasi tersebut cacat hukum dan berpotensi batal demi hukum.

BKD Diduga Tutup-utupi Hasil UKOM

Ketua LSM P3H Sumut, Jaspen Pardede dan Zulkifli Gayo, juga menyoroti tertutupnya hasil Ujian Kompetensi (UKOM) Eselon II oleh BKD Kota Binjai.

“UKOM adalah instrumen publik untuk men-jamin objektivitas ASN. Jika hasilnya disembunyi-kan, maka itu pelanggaran serius terhadap prinsip keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008,” ujar Jaspen tegas.

Ia menambahkan, sistem karier berbasis hubun-gan keluarga telah mencederai prinsip hukum tata negara.

“Negara tidak boleh tunduk pada loyalitas darah. Nepotisme adalah bentuk nyata penyimpangan konstitusional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,” pungkasnya.

Kinerja Anjlok, Integritas Runtuh

Zainul menyebut narkoba telah menjadi anca-

man serius dunia, dengan angka kematian akibat penyalahgunaan narkoba secara global mencapai 585 ribu orang per tahun atau rata-rata 52 orang meninggal setiap jam.

"Angka kematian akibat narkoba di dunia bah-kan lebih besar daripada akibat konflik bersenjata dan terorisme," katanya.

Sementara itu, Penasihat Ahli Kapolri Andi Subi-akto menambahkan jika peredaran narkoba tidak tertangani serius, cita-cita menuju Generasi Emas 2045 akan gagal, sehingga bonus demografi bisa berubah menjadi bencana demografi.

Ia pun menyoroti adanya rumah tahanan narkoba yang justru menjadi pusat produksi dan peredaran narkoba di Tanah Air.

"Bahaya narkotika ini bukan lagi sekadar isu kriminal, melainkan sudah menjadi ancaman geo-politik dan geodemografi," ujar Andi.

Andi menilai pendekatan lunak (soft approach)

Namun, berdasarkan pantauan wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Abdul Wahid terlihat tiba bersama dengan Kepala Dinas PUPR-PKPP Muhammad Arief Setiawan dan Sekretaris Dinas PUPR-PKPP Ferry Yunanda.

Mereka langsung dilakukan pemeriksaan

Kota Medan memang sedang rajin mem-bongkar. Jalan dibongkar. Trotoar dibongkar. Parit dibongkar. Tapi sayangnya, semangat membongkar itu tidak diiringi kemampuan menata ulang. Akibatnya, di banyak sudut kota, yang tersisa hanyalah lubang, debu, dan kelu-han. Seperti orang yang rajin membuangnang pohon tapi lupa menanam bibit pengganti.

Sungguh ironis, ketika pemerintah bic-ara soal “Medan Cantik”, tapi yang tampak justru kota yang kian jorok dan semrawut. Di Marelan, warga mengaku malu saat Idulfitri lalu. Bukan karena rumah tak megah, tapi ka-rena parit di depan rumah mereka berubah jadi kubangan busuk yang menyambut tamu. Inikah wajah kota metropolitan yang dibanggakan itu?

Lebih menyakitkan lagi, banyak warga akhirnya memperbaiki sendiri bagian parit di depan rumahnya, menggunakan uang pribadi. Sementara yang punya wewenang justru diam.

ucapnya.

Whoosh dibangun dengan nilai total inves-tasi US\$7,2 miliar atau setara Rp116,54 triliun (asumsi kurs Rp16.186 per dolar AS). Angka tersebut termasuk pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar US\$1,2 miliar dari nilai investasi awal yang ditetapkan senilai US\$6,05 miliar.

Dari total biaya investasi US\$7,2 miliar itu, 75 persen di antaranya didapat dari pinjaman China Development Bank (CDB).

Sementara 25 persen berasal dari setoran modal pemegang saham, yaitu gabungan beberapa BUMN dari PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) sebesar 60 persen dan Beijing Yawan HSR Co Ltd sebesar 40 persen.(**cnni/js**)

manfaat tidak untuk rakyat. Di seluruh dunia seperti itu. Ini namanya public service obliga-tions (PSO)," kata Prabowo di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Selasa (4/11).

Saat ini, Indonesia baru memiliki kereta cepat di Pulau Jawa. Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh melayani perjalanan dari Halim di DKI Jakarta ke Padalarang dan Tegalluar di Jawa Barat.

Pemerintah berencana memperpanjang jalur kereta cepat hingga Surabaya. Hari ini, Prabowo mengumumkan rencana pembangunan jalur Whoosh sampai Banyuwangi.(**cnni/js**)

Sementara itu, berbagai program strategis di bawah koordinasi Chairin Fitri Simanjuntak dilapor-kan mangkrak.

Program kartu parkir elektronik, yang ditargetkan menyumbang PAD Rp2,5 miliar per tahun, hanya menghasilkan Rp1,2 miliar.

Mesin uji KIR senilai ratusan juta rupiah terbeng-kalai, dan fasilitas traffic light serta marka jalan tak terawat.

Situasi ini memperkuat kesimpulan publik bahwa kinerja buruk ASN di Binjai berakar pada penempa-tan pejabat yang tidak profesional dan sarat nepo-tisme.

Pelanggaran Sistemik

Praktik nepotisme dan “ASN impor” tidak hanya mencoreng integritas birokrasi, tetapi juga berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.

Pasal 5 UU tersebut menegaskan bahwa pe-nyelenggara negara wajib menghindari konflik kepentingan, termasuk dalam pengangkatan pejabat publik.

Jika temuan ini benar, maka Pemko Binjai berpo-tensi melanggar tiga regulasi sekaligus:

1. UU ASN No. 5 Tahun 2014
2. PP Manajemen ASN No. 11 Tahun 2017
3. UU Anti KKN No. 28 Tahun 1999

Desakan Evaluasi dan Audit Khusus

Masyarakat dan aktivis hukum kini menuntut Ke-menterian PAN-RB dan BKN melakukan audit men-yeluruh terhadap sistem kepegawaian Kota Binjai, terutama terkait mutasi lintas daerah dan penempatan pejabat berunsur keluarga.

“Kalau dibiarkan, ini bukan sekadar pelanggaran administratif, tapi pengkhianatan terhadap hukum tata negara,” tutup Jaspen Pardede.

Sementara Pj Sekda Binjai Chairin Fitri Siman-juntak saat dikonfirmasi lewat WhatsApp nya, Selasa, (04/11/2025) enggan berkomentar. Dia hanya mengatakan, "nanti kita koordinasi ya bang."(**B-016**)

.....

sudah tidak relevan, sehingga sekarang saatnya me-nerapkan hard approach, yaitu tindakan yang lebih keras dan tegas.

Berdasarkan Indonesia Drug Report 2025, jum-lah narapidana dan tahanan kasus narkoba mencapai 141.016 orang. Dari jumlah itu, 76.712 merupakan bandar, pengedar, penadah, dan produsen, semen-tara sebanyak 64.304 lainnya merupakan pengguna.

Provinsi Sumatera Utara tercatat memiliki jumlah tahanan kasus narkoba tertinggi pada 2024 dengan 19.378 orang, termasuk 10.952 bandar dan pengedar. Jawa Timur menyusul di posisi kedua dengan 13.917 orang, disusul Jawa Barat 10.989 orang, Riau 8.767 orang, dan DKI Jakarta 8.533 orang.

Kalimantan Timur menempati posisi keenam dengan 7.979 orang, diikuti Sumatra Selatan 7.593 orang, Sulawesi Selatan 6.823 orang, Kalimantan Selatan 6.766 orang, dan Jawa Tengah 6.106 orang.(**ant/js**)

secara intensif begitu tiba di gedung dwiwarna.

Berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang tertangkap tan-gan tersebut.(**cnni/js**)

Barangkali mereka sedang sibuk mencari proyek berikutnya untuk dibongkar.

Kalau begini caranya, Medan bukan sedang dibangun, melainkan dikoyak sedikit demi sedikit oleh tangannya sendiri. Kota ini seolah tak punya peta kesadaran, hanya peta proyek. Tak heran bila kepercayaan warga pun ikut tergerus, tenggelam di dasar parit yang tak pernah ditutup kembali.

Dan mungkin, di situlah masalah terbesar-nya ketika urusan publik tak lagi dipandang sebagai amanah, tapi sekadar proyek yang bisa diting-galkan kapan saja tanpa rasa bersalah. Padahal dalam pandangan Islam, setiap pekerjaan adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawa-ban, sekecil apa pun itu.

Kalau pemerintah masih tega membiarkan lubang-lubang itu menganga, maka sesung-guhnya yang mereka biarkan bukan cuma jalan rusak, tapi juga rusaknya rasa percaya rakyat.

Rumah Hakim

Dari Halaman 1

Untung Lubis, Selasa (4/11/2025).

Ia menjelaskan, setelah menerima laporan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan segera menurunkan sejumlah personel dan armada ke lokasi.

“Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 11.18 WIB oleh petugas pemadam kebakaran yang dibantu warga sekitar,” tambahnya.

Sementara, juru bicara PN Medan Soniady membe-narkan peristiwa tersebut. Soni mengatakan Khamozaro telah melaporkan hal ini ke pihak kepolisian.

"Benar hari ini ada kebakaran di kediaman hakim PN Medan Pak Khamozaro dan kejadian tersebut sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian setempat untuk dit-injaklanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku," ucap Soni singkat.

Hingga kini, penyebab kebakaran masih dalam pe-nyelidikan pihak berwenang. Kasus tersebut juga telah dilaporkan ke Polsek Sunggal untuk penanganan lebih lanjut.

Pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait penyebab kebakaran tersebut. Namun, laporan awal menyebutkan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini.

Aparat penegak hukum diminta memastikan tidak ada indikasi intimidasi atau upaya mengganggu independ-ensi peradilan dalam kasus ini. (**A-10**)

Warga Deliserdang

Dari Halaman 1

busuk. Warga memblokir jalan dengan menggunakan batu berukuran besar dan batang pohon.

"Lihat ini sampah semua, kalian yang lewat buang sampah sembarangan, coba rumah klen (kalian) yang buang sampah di sini ku buang sampah ke rumah klen. Ma-rah gak klen, pasti marah kan. Kami resah dengan banyaknya sampah di sini," kata salah seorang pria dalam video itu.

Sementara itu, Andri (48) salah seorang warga setem-pat mengaku sampah-sampah tersebut sudah empat tahun terakhir ada di lokasi itu. Bahkan saat ini jumlahnya semakin banyak hingga menumpuk dan berserakan di badan jalan.

"Sudah bertahun-tahun sampah itu menumpuk di sini. Awalnya menumpuk di kanan dan kiri jalan, tapi sekarang semakin banyak sampai ke tengah jalan tumpukan sampahn-ya. Ini saja sampahnya sudah sepanjang 100 meter saya lihat," ujarnya, Selasa (4/11).

Menurut Andri sampah tersebut dibuang oleh pengguna jalan yang melintasi jalan tersebut. Padahal lokasi itu bukan tempat pembuangan sampah. Bahkan warga juga sudah beberapa kali menangkap orang yang membuang sampah. Akan tetapi tetap saja ada yang membuang sampah di sana..(**cnni/js**)



Whoosh Tanggung Jawab Presiden

Dari Halaman 1

nasional, khususnya proyek strategis yang diwariskan pemerintahan sebelumnya. Ia tidak mengambil jarak, tetapi justru mengafirmasi tanggung jawabnya sebagai kepala negara. Ini penting dalam konteks kontinuitas pembangunan. Banyak pemimpin cenderung menghindari dari kebijakan pendahulunya ketika menuai kritik, tetapi Prabowo memilih untuk memikulnya.

Dalam bahasa politik, ini adalah pesan konsistensi dan stabilitas dua hal yang dibutuhkan dunia usaha dan publik untuk tetap percaya pada arah pembangunan nasional.

Namun, pernyataan tersebut juga menuntut pembacaan yang lebih kritis. Prabowo mengatakan bahwa proyek transportasi publik tidak bisa semata dihitung dari sisi laba-rugi, tetapi dari manfaatnya bagi rakyat. Pandan-gan ini sebenarnya sejalan dengan prinsip public service obligation (PSO), yang menjadi dasar ekonomi publik di banyak negara.

Infrastruktur seperti kereta cepat, MRT, atau jalan tol memang tidak selalu menguntungkan secara finan-sial, tetapi bernilai tinggi secara sosial. Ia mempercepat mobilitas, membuka akses ekonomi baru, mengurangi kemacetan, dan meningkatkan efisiensi waktu masyarakat.

Kendati demikian, semangat pelayanan publik ini tidak boleh menghapus prinsip transparansi dan akuntabilitas. Fakta bahwa Whoosh menelan biaya investasi sebesar US\$7,2 miliar atau sekitar Rp116 triliun, dengan 75 pers-en dibayai pinjaman dari China Development Bank, men-imbulkan pertanyaan serius tentang keberlanjutan fiskal. Publik perlu tahu bagaimana rencana pelunasan pinjaman itu, berapa proyeksi pendapatan dari penumpang, serta bagaimana strategi pemerintah menutup kemungkinan defisit operasional. Tanpa kejelasan tersebut, proyek yang dimaksudkan untuk melayani rakyat bisa justru menjadi beban rakyat di masa depan.

Pernyataan Prabowo bahwa “Indonesia bukan negara sembarangan” mengandung pesan kebanggaan nasional yang kuat. Ia ingin menegaskan bahwa bangsa ini mampu mengelola teknologi tinggi dan proyek besar. Namun, nasionalisme seperti ini sebaiknya tidak berhenti pada retorika kebanggaan, melainkan diwujudkan dalam profe-sionalisme dan efisiensi pengelolaan. Bangsa besar bukan diukur dari besarnya proyek, tetapi dari kemampuannya mengelola proyek itu dengan bersih, transparan, dan bero-rientasi pada manfaat publik.

Optimisme presiden tentu patut diapresiasi, apalagi di tengah suasana ekonomi global yang penuh ketidakpas-tian. Namun, optimisme harus berdiri di atas data dan per-encanaan yang matang. Jangan sampai semangat menan-ggung tanggung jawab justru berubah menjadi beban fiskal jangka panjang bagi negara. Tanggung jawab seorang presiden bukan hanya menenangkan publik dengan kata-kata, tetapi memastikan setiap rupiah dari uang rakyat bekerja secara efektif untuk kesejahteraan rakyat.

Jika benar dijalankan dengan prinsip good governance, proyek Whoosh bisa menjadi simbol kemajuan peradaban transportasi Indonesia. Ia akan menjadi contoh bahwa negara ini tidak hanya bisa membangun infrastruktur megah, tetapi juga mampu mengelolanya secara berkelan-jutan. Dalam hal ini, pernyataan “Saya tanggung jawab Whoosh” seharusnya dibaca bukan sebagai janji politik, melainkan sebagai kontrak moral seorang presiden kepada rakyatnya: bahwa setiap proyek besar negara harus beru-jung pada kemanfaatan sosial, bukan sekadar kebanggaan simbolik.